

PERAN DINAS TENAGA KERJA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS KEMAMPUAN ANGKATAN KERJA DI KABUPATEN BATUBARA

¹Mangaraja Manurung, ²Fiqria Muzdalifah Hsb, ³Hamzah, ⁴Fahmi Anugrah

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Asahan

¹Email : mrajamanurung1970@gmail.com

ABSTRAK

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja adalah orang yang mempunyai kemampuan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik di dalam maupun di luar perjanjian kerja. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengantisipasi Untuk Meningkatkan Peluang Kerja Masyarakat di Kabupaten Batubara serta Hambatan Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengantisipasi Luar Daerah Untuk Meningkatkan Peluang Kerja Masyarakat di Kabupaten Batubara. Artikel yang berjudul Para Dinas Tenaga Kerja dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Kemampuan Angkatan Kerja dalam hal menggunakan metode Penelitian Hukum Empiris digunakan sebagai dasar dalam melakukan penelitian hukum. Metodologi ini melibatkan pengumpulan data kehidupan nyata yang diperoleh dari perilaku manusia, termasuk bahasa lisan yang diperoleh dari wawancara dan tindakan fisik yang diamati secara langsung. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Dinas Tenaga Kerja mempunyai kemampuan untuk melakukan kajian mendalam terhadap kebutuhan tenaga kerja di Kabupaten Batubara. Bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk universitas dan lembaga pelatihan, untuk menawarkan pelatihan dan inisiatif peningkatan keterampilan kepada masyarakat setempat. Adapun kendala dalam mengantisipasi maraknya lapangan kerja masyarakat yang menghambat pelaksanaan program-program penting, yang dapat mencakup pelatihan keterampilan, promosi lowongan kerja, dan pengembangan sektor industri.

Kata Kunci : Pelatihan; Peluang; Pekerjaan

ABSTRACT

In accordance with Law Number 13 of 2003 concerning Employment, workers are people who have the ability to produce goods and services to meet community needs, both within and outside of employment agreements. The purpose of this writing is to determine the role of the Manpower Service in anticipating increasing Community Employment Opportunities in Batubara Regency and Obstacles for the Manpower Service in Anticipating Outside the Region to Increase Community Employment Opportunities in Batubara Regency. The article entitled Manpower Services in Efforts to Improve the Quality of Workforce Capabilities in terms of using Empirical Legal Research methods is used as a basis for conducting legal research. This methodology involves collecting real-life data obtained from human behavior, including spoken language obtained from interviews and directly observed physical actions. The results of this research are that the Manpower Department has the ability to conduct an in-depth study of labor needs in Batubara Regency. Collaborates with various institutions, including universities and training institutes, to offer training and skills enhancement initiatives to local communities. There are obstacles in anticipating the rise in public employment which hinder the implementation of important programs, which can include skills training, promotion of job vacancies and development of the industrial sector.

Keywords: Training; Opportunity; Work

I. PENDAHULUAN

Ketenagakerjaan mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, mulai dari pra-kerja hingga pasca-kerja. Oleh karena itu, perlindungan tenaga kerja sangat penting untuk menjaga hak-hak dasar pekerja dan menjamin persamaan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, dengan tujuan akhir mencapai kesejahteraan pekerja.¹

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja adalah orang yang mempunyai kemampuan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik di dalam maupun di luar perjanjian kerja. Pasal 8 undang-undang yang sama menguraikan perencanaan ketenagakerjaan dan informasi ketenagakerjaan, yang mencakup aspek-aspek seperti kesempatan kerja, pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja, kondisi kerja, hubungan industrial, pengupahan, dan kesejahteraan tenaga kerja. Ketenagakerjaan masih menjadi topik diskusi yang penting di antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan keluarga.² Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk memberdayakan dan mengoptimalkan angkatan kerja, menciptakan pemerataan kesempatan kerja, memberikan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas³ salahsatunya Proses pengembangan angkatan kerja sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam merencanakan dan mempersiapkan angkatan kerja. Pembangunan ini dilakukan melalui prinsip integrasi dan kemitraan. Pada hakikatnya pekerja adalah individu yang mampu melaksanakan tugas dan terlibat dalam aktivitas kerja, baik di dalam maupun di luar konteks hubungan kerja.⁴

Konsep tenaga kerja dapat memiliki interpretasi yang berbeda-beda. Di satu sisi, ini bisa merujuk pada individu yang mampu dan bersedia bekerja demi keuntungan dirinya sendiri atau demi anggota keluarganya tanpa dibayar. Di sisi lain, bisa juga mencakup mereka yang bekerja untuk mendapatkan upah. Dalam pandangan Simanjuntak, angkatan kerja adalah kumpulan individu yang telah mencapai usia kerja dan mempunyai kemampuan melakukan kegiatan ekonomi dengan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, jelaslah bahwa tenaga kerja mengacu pada suatu segmen masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kemampuan, dalam istilah kemampuan fisik, biasanya diukur berdasarkan usia. Secara khusus, individu yang termasuk dalam populasi usia kerja dianggap mampu bekerja. Penulis Sitanggang dan Nachrowi telah menguraikan berbagai karakteristik angkatan kerja, termasuk ketersediaan tenaga kerja di pasar dan kesiapannya untuk digunakan dalam produksi barang dan jasa.⁵ Dengan demikian, perusahaan atau penerima tenaga kerja dapat meminta pekerja dari pasar tenaga kerja, dengan upah atau

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, n.d.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

³ Dany Try Utama Hutabarat et al., "Pendidikan Pancasila: Negara, Agama, Dan Warga Negara," *Jurnal Riset Pendidikan Dan Pengajaran* 1, no. 1 (2022): 1–14, <https://doi.org/10.55047/jrpp.v1i1.202>.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm.12

⁵ Sitanggang Dan Nachrowi, *Pengaruh Struktur Ekonomi Pada Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral: Analisis Model Demometrik Di 30 Propinsi Pada 9 Sektor Di Indonesia*, n.d.

gaji yang diberikan sebagai kompensasi setelah pekerjaan selesai. Selain itu, tenaga kerja terampil merupakan sumber daya berharga bagi perusahaan mana pun yang ingin mencapai tujuannya.

Seiring dengan kemajuan pembangunan, kesempatan kerja pun semakin meningkat. Fenomena ini menunjukkan semakin besarnya permintaan akan tenaga kerja. Sebaliknya, seiring bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan akan lapangan kerja juga meningkat. Penciptaan lapangan kerja baru merupakan tujuan utama dalam mencapai pembangunan ekonomi daerah. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui investasi langsung di sektor padat karya seperti konstruksi, infrastruktur, dan pengolahan. Sementara itu, di sektor jasa, inisiatif dapat diambil, seperti perdagangan dan pariwisata, untuk mencapai tujuan tersebut.⁶

Meningkatnya pertumbuhan penduduk menimbulkan banyak permasalahan pada masa kini dan masa depan. Salah satu masalah yang paling menonjol adalah kurangnya kesempatan kerja, yang menyebabkan peningkatan jumlah orang yang tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang layak. Akar permasalahan ini terletak pada bertambahnya jumlah pekerja yang berdampak pada berkurangnya prospek kerja karena tidak mencukupinya kapasitas untuk menampung seluruh pekerja. Selain itu, kegagalan pemerintah untuk campur tangan secara memadai dalam urusan penyedia lapangan kerja telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kelangkaan kesempatan kerja.

Kesejahteraan suatu masyarakat bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara negara. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Oleh karena itu, pendekatan ideal untuk memberdayakan masyarakat melibatkan kemitraan. Konsep kemitraan ini memerlukan kondisi khusus yang menjamin pemerataan peran antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dalam pendekatan ini, pemerintah menawarkan pedoman dan peraturan umum mengenai perannya dalam pembuatan kebijakan dan pendanaan.

Untuk memfasilitasi pembangunan, masyarakat diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya, sedangkan sektor swasta berkontribusi terhadap program pemberdayaan dengan berinvestasi di bidang energi. Gagasan kemitraan muncul dari kesulitan pendekatan pembangunan yang bersifat top-down, yang mana pemerintah memegang posisi dominan dan sektor swasta tidak tertarik pada kesejahteraan kelompok rentan.

Berbagai program yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat miskin telah dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Program-program ini biasanya dikelola melalui berbagai lembaga pemerintah seperti Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Sosial. Di antara program yang sering dipilih untuk memberdayakan individu atau masyarakat adalah program pendidikan nonformal. Tujuan dari program-program ini adalah untuk memberikan pelatihan dan keterampilan kepada masyarakat miskin sehingga mereka dapat menerapkannya untuk meningkatkan kehidupan mereka. Program pendidikan nonformal banyak dilakukan di tengah masyarakat, melalui berbagai lembaga pelatihan dan kursus yang semakin banyak dilakukan di berbagai daerah.

⁶ Amran Naukoko Dan Patrick Wauran Elvandry Tandiawan, *Pengaruh Investasi Swasta Dan Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kesempatan Kerja Di Kota Manado*, n.d.

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Hukum Empiris digunakan sebagai dasar dalam melakukan penelitian hukum. Metodologi ini melibatkan pengumpulan data kehidupan nyata yang diperoleh dari perilaku manusia, termasuk bahasa lisan yang diperoleh dari wawancara dan tindakan fisik yang diamati secara langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mendokumentasikan hasil perilaku manusia melalui artefak fisik dan arsip. Melalui metodologi ini, pendekatan identifikasi komprehensif ditetapkan

Tujuan penelitian dan rumusan masalah mengarah pada penerapan pendekatan empiris dalam analisis hukum.⁷ Pendekatan ini memandang hukum sebagai pola perilaku komunal yang terjalin dengan aspek sosial dan kehidupan masyarakat. Melalui penggunaan metode deduktif dapat diartikulasikan ketentuan-ketentuan yang mengatur peran Dinas Ketenagakerjaan dalam peningkatan kualitas tenaga kerja di Kabupaten Batubara. Sebaliknya, metode induktif melibatkan penggunaan data yang diperoleh dari penelitian lapangan untuk menarik kesimpulan yang lebih luas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengantisipasi Untuk Meningkatkan Peluang Kerja Masyarakat di Kabupaten Batubara.

Tujuan merupakan salah satu komponen dalam setiap kegiatan. Tanpa adanya tujuan yang hendak dicapai maka kegiatan tersebut tak memiliki kekuatan. Untuk memenuhi tanggung jawabnya, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Batubara beroperasi berdasarkan PERDA No. 5 Tahun 2017 yang fokus pada penempatan tenaga kerja lokal pada bidang tertentu untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan. Bidang-bidang tersebut antara lain pelatihan kerja, perumusan kebijakan operasional dan teknis terkait ketenagakerjaan, pengelolaan transmigrasi dan penempatan pekerja, hubungan industrial, dan jaminan sosial bagi pekerja. Masing-masing bidang mempunyai tugas dan fungsi tersendiri dalam meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat Kabupaten Batubara.⁸

Upaya peningkatan kompetensi angkatan kerja telah dilakukan untuk mengantisipasi potensi lonjakan penduduk di luar wilayah. Hal ini dilakukan dengan menjamin kesejahteraan pekerja dengan tetap mengikuti perkembangan dunia usaha dan minat para pengusaha pencari kerja di wilayah Kabupaten Batubara. Hal ini juga melibatkan penyeimbangan kompetensi yang dibutuhkan dengan tingkat pendidikan dan keterampilan calon karyawan di dunia kerja⁹

Berdasarkan laporan ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik Kabupaten Batubara, total angkatan kerja di daerah tersebut mencapai 155.514 orang. Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan penduduk yang menganggur dalam usia kerja, sedangkan mereka yang tidak melakukan kegiatan ekonomi karena alasan seperti pendidikan atau tanggung jawab rumah tangga diklasifikasikan sebagai bukan angkatan kerja. Meskipun terdapat rumah tangga dan faktor lainnya, jumlah angkatan kerja tertinggi terdiri dari individu dengan terbatasnya pendidikan dan keahlian. Hal ini mengakibatkan sebagian besar masyarakat Kabupaten Batubara bekerja pada sektor-sektor yang relatif sederhana dan membutuhkan tenaga kerja yang besar.¹⁰

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, n.d.).

⁸ Zakariah Matogu S.sos Kabid Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja Kabupaten Batubara, 24 Juli 2023. (n.d.).

⁹ Batubara.

¹⁰ Batubara.

Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan berperan penting dalam memperluas prospek lapangan kerja bagi warga Kabupaten Batubara. Terutama, mereka fokus pada penyediaan pelatihan kerja dan peluang penempatan kerja. Selain itu, mereka juga memprioritaskan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pengawasan ketenagakerjaan.¹¹

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batubara telah melaksanakan tugas untuk meningkatkan kemahiran pencari kerja dengan menerapkan langkah-langkah yang tercantum di bawah ini.

1. Tujuan penyampaian informasi mengenai kondisi ketenagakerjaan menjadi fokus kegiatan penjangkauan bimbingan kerja yang ditujukan kepada sekolah menengah atas, universitas, dan korporasi. Upaya ini mencakup penyajian informasi komprehensif mengenai peluang kerja yang tersedia dan kondisi di sekitarnya.
2. Menyelenggarakan pelatihan dan inisiatif produktivitas bagi individu yang mencari pekerjaan dan mereka yang saat ini bekerja.
3. Program pelatihan kewirausahaan dilaksanakan dengan tujuan untuk memotivasi individu yang tidak mampu mendapatkan posisi profesional di organisasi atau perusahaan. Program-program ini dirancang untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjadi wirausaha mandiri yang dapat menjalankan bisnis mereka sendiri secara profesional.

Bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja mempunyai banyak segi, dengan berbagai tugas yang harus dijalani. Diantaranya adalah: a) Penyiapan tenaga kerja sejak usia muda yang dilakukan melalui lembaga pendidikan; b) Pemanfaatan sumber daya alam daerah (SDA) dengan melaksanakan program pelatihan berbasis daerah; c) Kerjasama dengan dunia usaha dan industri (DU-DI) melalui pemantauan peluang yang ada; d) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pencari kerja melalui pelatihan vokasi yang difasilitasi oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK); e) Peningkatan keterampilan dan pemahaman calon pekerja melalui pemagangan sehingga meningkatkan kemampuan kerja.

Pernyataan di atas sejalan dengan anggapan bahwa prospek pekerjaan saat ini diamati dan dievaluasi secara cermat. Dari peluang tersebut muncul ide baru yaitu suatu bentuk pelatihan yang difasilitasi oleh sektor pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja. Departemen Tenaga Kerja dan Kependudukan telah menerapkan kebijakan untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan, dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja. Upaya ini juga dikenal sebagai magang.¹²

Sistem pemagangan mencakup sistem pelatihan kerja terpadu yang memadukan pelatihan di suatu institusi dengan pengalaman kerja langsung. Tujuan utama pemberian pelatihan adalah untuk memberikan pengetahuan kepada para pencari kerja yang sesuai dengan keahlian, minat, dan kemampuan mereka, sehingga mereka dapat ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja yang ada. Hal ini dilakukan melalui program pemagangan dalam negeri berbasis kompetensi, yang membantu mempercepat proses penempatan kerja. Penting untuk dicatat bahwa setiap pekerja berhak atas hak-hak tertentu dan mempunyai tanggung jawab khusus, serta kesempatan yang sama untuk memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan keterampilan dan keahlian kerja

¹¹ Batubara.

¹² Batubara.

mereka melalui pelatihan kerja dan pemagangan, yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan keahlian secara keseluruhan. produktivitas kerja.¹³

Dinas Ketenagakerjaan mempunyai kemampuan untuk meramalkan kebutuhan individu yang berada di luar daerah dan pada gilirannya meningkatkan prospek lapangan kerja bagi masyarakat Kabupaten Batubara. Hal ini dicapai melalui berbagai tanggung jawab yang diemban oleh layanan.

2. Hambatan Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengantisipasi Luar Daerah Untuk Meningkatkan Peluang Kerja Masyarakat di Kabupaten Batubara.

Dinas Tenaga Kerja dihadapkan pada tantangan untuk menciptakan lapangan kerja bagi para setengah pengangguran dan pengangguran di Kabupaten Batubara, serta melayani penduduk luar kota yang mungkin sedang mencari pekerjaan. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan pekerjaan, sehingga melaksanakan program di BLK (pusat pelatihan kerja). Program tersebut meliputi pelatihan di berbagai bidang seperti Teknologi Informasi dan Komunikasi/Komputer, menjahit, teknik las, otomotif, dan salon.¹⁴

Karena terbatasnya pendanaan, Departemen Tenaga Kerja mempunyai keterbatasan dalam pelaksanaan program-program penting yang memerlukan alokasi anggaran. Baru-baru ini telah keluar anggaran APBD Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batu Bara Tahun 2021

Uraian	Tahun anggaran 2021	
	Anggaran belanja	Persentase
Belanja operasi	835.383.347.381,00	63,94%
Belanja modal	266.940.195.697,00	20,43%
Belanja tidak terduga	14.052.895.768,00	1,08%
Belanja transfer	190.099.123.355,00	14,55%
Jumlah	1.306.475.562.201,00	100,00%

Untuk mencapai kesejahteraan tenaga kerja dengan tetap mengikuti kemajuan dunia usaha dan mempertimbangkan kepentingan para pengusaha yang mencari tenaga kerja di wilayah Kabupaten Batubara, maka perlu dilakukan keseimbangan antara tingkat pendidikan dan keterampilan calon tenaga kerja dengan potensi tenaga kerja. kompetensi yang dibutuhkan dalam industri. Sayangnya, hal ini dapat membatasi kapasitas mereka untuk memberikan pelatihan keterampilan, mengiklankan lowongan pekerjaan, atau mendukung pengembangan sektor industri.¹⁵

Salah satu faktor utama yang mungkin menghambat penyediaan fasilitas dan sumber daya penting adalah keterbatasan anggaran. Tantangan lain yang mungkin dihadapi oleh staf Departemen Tenaga Kerja adalah kurangnya keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengantisipasi kebutuhan penduduk non-lokal. Hal ini memerlukan pemahaman komprehensif mengenai tren pasar tenaga kerja,

¹³ Batubara.

¹⁴ Batubara.

¹⁵ Batubara.

perkembangan sektor industri, serta strategi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.¹⁶

Dinas Ketenagakerjaan berupaya membangun kemitraan yang kuat dengan entitas terafiliasi, termasuk universitas, lembaga pelatihan, pemberi kerja, dan organisasi masyarakat. Kurangnya kerjasama ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk memperoleh sumber daya tambahan, keahlian, dan koneksi yang bermanfaat bagi pengembangan program ketenagakerjaan.¹⁷

Kelangkaan infrastruktur yang efisien, khususnya di sektor transportasi dan teknologi informasi, dapat menghambat penyebaran lowongan kerja dan ketersediaan kursus pengembangan keterampilan. Ketiadaan aksesibilitas dapat menghambat individu untuk mendapatkan pelatihan yang diperlukan atau mencari pekerjaan di luar lingkungan sekitar mereka.¹⁸

Ketika perubahan jumlah penduduk yang tinggal di luar suatu wilayah disebabkan oleh perubahan demografi seperti penurunan jumlah penduduk atau perubahan kebutuhan lapangan kerja, Departemen Tenaga Kerja mungkin akan menghadapi kesulitan dalam upaya mereka untuk menyesuaikan strategi dan program mereka terhadap perubahan tersebut. Keberhasilan dalam menanggapi penyesuaian ini memerlukan analisis yang cermat dan perencanaan yang cermat. Untuk mengatasi kendala tersebut, Dinas Ketenagakerjaan dapat bekerjasama dengan entitas terkait seperti BLK, Dinas Sosial, PT, dan Perusahaan. Mereka juga dapat meningkatkan alokasi anggaran, kapasitas staf, dan berinvestasi pada infrastruktur yang diperlukan. Selain itu, akan bermanfaat jika melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program untuk memastikan kebutuhan dan tujuan masyarakat terpenuhi.¹⁹

Kita harus mengakui pentingnya pemerintah daerah merancang kebijakan yang menjaga keseimbangan antara mendukung kemajuan ekonomi dan perluasan wilayah, sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat yang berada di luar wilayah tersebut. Upaya bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan ini.

IV. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dinas Tenaga Kerja berperan penting dalam memprediksi kebutuhan individu di luar daerah dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang berada di Kabupaten Batubara. Departemen Tenaga Kerja dapat menjalankan beberapa fungsi, antara lain:

- a. Dinas Tenaga Kerja mempunyai kemampuan untuk melakukan kajian mendalam terhadap kebutuhan tenaga kerja di Kabupaten Batubara. Analisis komprehensif ini mencakup identifikasi berbagai jenis pekerjaan yang diperlukan, penentuan tingkat keahlian yang dibutuhkan, dan penghitungan jumlah pasti pekerja yang dibutuhkan di berbagai sektor.
- b. Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk universitas dan lembaga pelatihan, untuk menawarkan pelatihan dan inisiatif peningkatan keterampilan kepada masyarakat setempat. Dengan meningkatkan keahlian angkatan kerja regional, prospek mereka untuk mendapatkan pekerjaan dapat lebih besar.

¹⁶ Batubara.

¹⁷ Batubara.

¹⁸ Batubara.

¹⁹ Batubara.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Batubara mungkin menghadapi berbagai kendala dalam mengantisipasi maraknya lapangan kerja masyarakat. Mereka mungkin menghadapi keterbatasan anggaran yang menghambat pelaksanaan program-program penting, yang dapat mencakup pelatihan keterampilan, promosi lowongan kerja, dan pengembangan sektor industri. Selain itu, karyawan mereka mungkin kurang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengantisipasi kebutuhan penduduk di luar wilayah tersebut. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai tren pasar tenaga kerja, perkembangan sektor industri, serta strategi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, n.d.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, n.d.

C. Jurnal

Elvandry Tandiawan, Amran Naukoko Dan Patrick Wauran. *Pengaruh Investasi Swasta Dan Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kesempatan Kerja Di Kota Manado*, n.d

Hutabarat, Dany Try Utama, Ajeng Alda Sari, Anggun Wella, Anzas Elfindra, Firman Febrian Lubis, Faras Musyarih MHD, Fadillah Asmuni MPR, and Siti Rahmadani. "Pendidikan Pancasila: Negara, Agama, Dan Warga Negara." *Jurnal Riset Pendidikan Dan Pengajaran* 1, 2022, no. 1: 1–14. <https://doi.org/10.55047/jrpp.v1i1.202>.

Nachrowi, Sitanggang Dan. *Pengaruh Struktur Ekonomi Pada Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral: Analisis Model Demometrik Di 30 Propinsi Pada 9 Sektor Di Indonesia*, n.d.

D. Hasil Wawancara

Batubara, Zakariah Matogu S.sos Kabid Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja Kabupaten. 24 Juli 2023. (n.d.).